



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NOVA ADIWIDANTO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 210539

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.457.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m<sup>2</sup>/72 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.250.000.000
2. Tanah Seluas 1000 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
3. Tanah Seluas 7570 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 685.000.000
4. Tanah Seluas 2900 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 147.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 174.500.000**

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA STAR SEPEDA MOTOR Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
3. MOBIL, TOYOYA YARIS SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. MOTOR, YAMAHA LEXI MOTOR MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
5. MOTOR, SUZUKI SATRIA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 22.500.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 156.197.970**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.810.197.970
III. HUTANG	Rp.	16.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.793.697.970

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.